



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN TROWULAN
DESA PAKIS

Jl. Dusun Pakis Kulon Desa Pakis Kec. Trowulan Mojokerto (61362)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145/ *229* / 416 – 312.5 / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **KHOIRUL HADI**
Jabatan : Kepala Desa Pakis
Alamat : Dsn. Pakis Kulon RT 02 RW 02 Desa Pakis
Kecamatan : Trowulan
Kabupaten : Mojokerto

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Lembaga : SDN PAKIS 1
Alamat : Dsn. Pakis Kulon RT 01 RW 01 Desa Pakis Kecamatan Trowulan
Kabupaten Mojokerto.
Tahun Pendirian : 17 Maret 1976
NPSN : 20502977

Bahwa SDN PAKIS 1 tersebut benar – benar berdiri pada tanggal 17 Maret 1976 yang bertempat di Dsn. Pakis Kulon RT 01 RW 01 Desa Pakis Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pakis, 24 Juni 2022
KEPALA DESA PAKIS



KHOIRUL HADI



SALINAN

BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto perlu untuk diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 18) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) TKN Pembina merupakan pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas Pendidikan pada satuan pendidikan TKN Pembina.
 - (2) TKN Pembina dipimpin oleh Kepala Sekolah yang merupakan jabatan fungsional Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris setelah berkoordinasi dengan Bidang terkait.
 - (3) TKN Pembina berjumlah 28 (dua puluh delapan) dengan nomenklatur sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) SDN merupakan pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas Pendidikan pada satuan pendidikan SDN.
 - (2) SDN dipimpin oleh Kepala Sekolah yang merupakan jabatan fungsional Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris setelah berkoordinasi dengan Bidang terkait.
 - (3) SDN berjumlah 385 (tiga ratus delapan puluh lima) dengan nomenklatur sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 3. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) SMPN merupakan pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas Pendidikan pada satuan pendidikan SMPN.

- (2) SMPN dipimpin oleh Kepala Sekolah yang merupakan jabatan fungsional Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris setelah berkoordinasi dengan Bidang terkait.
- (3) SMPN berjumlah 40 (empat puluh) dengan nomenklatur sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 4 Maret 2021
BUPATI MOJOKERTO,

ttd.

IKFINA FAHMAWATI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 4 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd.

DIDIK CHUSNUL YAKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR 24

**Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO**



TATANG M., SH., MH.

NIP. 19670626 198703 1 002

**NOMENKLATUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)**

- A. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Jatirejo meliputi :
1. SDN Baureno;
 2. SDN Bleberan;
 3. SDN Dinoyo 1;
 4. SDN Dinoyo 2;
 5. SDN Dukuhngarjo;
 6. SDN Gading;
 7. SDN Gebangsari;
 8. SDN Jatirejo 1;
 9. SDN Jatirejo 2;
 10. SDN Jembul;
 11. SDN Karangjeruk;
 12. SDN Kunitir 1;
 13. SDN Kunitir 2;
 14. SDN Lebakjabung;
 15. SDN Manting;
 16. SDN Mojogeneng;
 17. SDN Padangasri;
 18. SDN Rejosari;
 19. SDN Sumberagung;
 20. SDN Sumberjati;
 21. SDN Sumengko; dan
 22. SDN Tawangrejo.
- B. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Gondang meliputi :
1. SDN Bakalan;
 2. SDN Begaganlimo;
 3. SDN Bening;
 4. SDN Centong;
 5. SDN Dilem;
 6. SDN Gondang;
 7. SDN Gumeng;
 8. SDN Jatidukuh;
 9. SDN Kalikatur;
 10. SDN Karangkuten;
 11. SDN Kebontunggul;
 12. SDN Kemasantani;
 13. SDN Ngembat;
 14. SDN Padi;
 15. SDN Pohjejer;
 16. SDN Pugeran;
 17. SDN Tawar; dan
 18. SDN Wonoploso.

C. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Pacet meliputi :

1. SDN Bendunganjati;
2. SDN Candiwatu;
3. SDN Cepokolimo;
4. SDN Claket;
5. SDN Kembangbelor;
6. SDN Kemiri 1;
7. SDN Kemiri 2;
8. SDN Kesimantengah;
9. SDN Kuripansari;
10. SDN Mojokembang;
11. SDN Nogosari;
12. SDN Pacet 1;
13. SDN Pacet 2;
14. SDN Padusan;
15. SDN Pandan;
16. SDN Petak;
17. SDN Sajen 1;
18. SDN Sajen 2;
19. SDN Sumberkembar;
20. SDN Tanjungkenongo 1;
21. SDN Tanjungkenongo 2;
22. SDN Warugunung; dan
23. SDN Wiyu.

D. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Trawas meliputi :

1. SDN Belik;
2. SDN Duyung;
3. SDN Jatijejer;
4. SDN Kedungudi;
5. dihapus;
6. SDN Ketapanrame 1;
7. SDN Ketapanrame 2;
8. SDN Penanggungan;
9. SDN Seloliman;
10. SDN Selotapak;
11. SDN Sugeng;
12. SDN Sukosari;
13. SDN Tamiajeng
14. SDN Trawas 1; dan
15. SDN Trawas 2.

E. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Ngoro meliputi :

1. SDN Bandarasri 1;
2. SDN Bandarasri 2;
3. SDN Candiharjo;
4. SDN Jasem;
5. SDN Kembangsri;
6. SDN Kesemen;
7. SDN Kunjorowesi 1

8. SDN Kunjorowesi 2;
9. SDN Kunjorowesi 3;
10. SDN Kutogirang;
11. SDN Lolawang;
12. SDN Manduro 1;
13. SDN Manduro 2;
14. SDN Ngoro 1;
15. SDN Ngoro 2;
16. SDN Ngoro 3;
17. SDN Purwojati 1;
18. SDN Purwojati 2;
19. SDN Sedati 1;
20. SDN Sedati 2;
21. SDN Srigading;
22. SDN Sukoanyar;
23. SDN Tanjangrono 1;
24. SDN Tanjangrono 2;
25. SDN Watesnegoro 1;
26. SDN Watesnegoro 2;
27. SDN Watesnegoro 3;
28. SDN Wonosari; dan
29. SDN Wotanmas Jedong.

F. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Pungging meliputi :

1. SDN Balongmasin 1;
2. SDN Balongmasin 2;
3. SDN Bangun;
4. SDN Banjartanggul;
5. SDN Curahmojo;
6. SDN Jabon;
7. SDN Jatilangkung;
8. SDN Kalipuro;
9. SDN Kedungmungal;
10. SDN Kembangringgit 1;
11. SDN Kembangringgit 2;
12. SDN Kembangringgit 3;
13. SDN Lebaksono;
14. SDN Mojorejo;
15. SDN Ngrame;
16. SDN Pungging 1;
17. SDN Pungging 2;
18. SDN Pungging 3;
19. SDN Purworejo;
20. SDN Randuharjo 1;
21. SDN Randuharjo 2;
22. SDN Sekargadung 1;
23. SDN Sekargadung 2;
24. SDN Tempuran;
25. SDN Tunggalpager;
26. SDN Watukenongo 1; dan
27. SDN Watukenongo 2.

G. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Kutorejo meliputi :

1. SDN Gedangan 1;
2. SDN Gedangan 2;
3. SDN Jiyu 1;
4. SDN Jiyu 2;
5. SDN Kaligoro;
6. SDN Karangasem;
7. SDN Karangdiyeng 1;
8. SDN Karangdiyeng 2;
9. SDN Kepuharum;
10. SDN Kepuhpandak 1;
11. SDN Kepuhpandak 2;
12. SDN Kertosari;
13. SDN Ketidur;
14. SDN Kutorejo;
15. SDN Payungrejo;
16. SDN Sampangagung 1;
17. SDN Sampangagung 2;
18. SDN Sawo 1;
19. SDN Sawo 2;
20. SDN Simbaringin;
21. SDN Singowangi;
22. SDN Windurejo 1;
23. SDN Windurejo 2;
24. SDN Wonodadi 1; dan
25. SDN Wonodadi 2.

H. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Mojosari meliputi :

1. SDN Awang-awang;
2. SDN Belahantengah;
3. SDN Jotangan;
4. SDN Kauman;
5. SDN Kebondalem;
6. SDN Kedunggempol;
7. SDN Leminggir;
8. SDN Menanggal;
9. SDN Modopuro 1;
10. SDN Modopuro 2;
11. SDN Mojosari;
12. SDN Mojosulur 1;
13. SDN Mojosulur 2;
14. SDN Ngimbangan;
15. SDN Pekukuhan;
16. SDN Randubango;
17. SDN Sawahan;
18. SDN Seduri 1;
19. SDN Seduri 2;
20. SDN Sumbertanggul 1;
21. SDN Sumbertanggul 2; dan
22. SDN Wonokusumo.

- I. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Dlanggu meliputi :
 1. SDN Dlanggu;
 2. SDN Jrambe;
 3. SDN Kalen;
 4. SDN Kedunggede 1;
 5. SDN Kedunggede 2;
 6. SDN Kedunglengkong;
 7. SDN Mojokarang;
 8. SDN Ngembah 1;
 9. SDN Ngembah 2;
 10. SDN Pohkecik;
 11. SDN Punggul;
 12. SDN Randugenengan;
 13. SDN Sambilawang;
 14. SDN Segunung;
 15. SDN Sumberkarang;
 16. SDN Sumbersono;
 17. SDN Talok 1;
 18. SDN Talok 2; dan
 19. SDN Tumapel.
- J. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Bangsal meliputi :
 1. SDN Bangsal;
 2. SDN Gayam;
 3. SDN Kedunguneng;
 4. SDN Kutoporong;
 5. SDN Mejoyo;
 6. SDN Mojotamping;
 7. SDN Ngastemi 1;
 8. SDN Ngastemi 2;
 9. SDN Ngrowo 1;
 10. SDN Ngrowo 2;
 11. SDN Pacing;
 12. SDN Pekuwon;
 13. SDN Peterongan;
 14. SDN Puloniti;
 15. SDN Salen;
 16. SDN Sidomulyo;
 17. SDN Sumbertebu;
 18. SDN Sumberwono; dan
 19. SDN Tinggarbuntut.
- K. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Puri meliputi :
 1. SDN Balongmojo;
 2. SDN Banjaragung 1;
 3. SDN Banjaragung 2;
 4. SDN Brayung 1;
 5. SDN Brayung 2;
 6. SDN Kebonagung;
 7. SDN Kenanten;

8. SDN Ketemasdungus;
 9. SDN Kintelan 1;
 10. SDN Kintelan 2;
 11. SDN Mlaten;
 12. SDN Plososari;
 13. SDN Puri;
 14. SDN Sumbergirang 1;
 15. SDN Sumbergirang 2;
 16. SDN Sumolawang;
 17. SDN Tambak Agung;
 18. SDN Tampungrejo; dan
 19. SDN Tangunan.
- L. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Trowulan meliputi :
1. SDN Balongwono;
 2. SDN Bejijong 1;
 3. SDN Bejijong 2;
 4. SDN Beloh;
 5. SDN Bicak;
 6. SDN Domas;
 7. SDN Jambuwok;
 8. SDN Jatipasar;
 9. SDN Kejagan;
 10. SDN Pakis 1;
 11. SDN Pakis 2;
 12. SDN Panggih;
 13. SDN Sentonorejo;
 14. SDN Temon;
 15. SDN Trowulan;
 16. SDN Watesumpak 1;
 17. SDN Watesumpak 2;
 18. SDN Wonorejo 1; dan
 19. SDN Wonorejo 2.
- M. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Sooko meliputi :
1. SDN Blimbingsari;
 2. SDN Brangkal;
 3. SDN Gemekan;
 4. SDN Jampirogo;
 5. SDN Japan;
 6. SDN Karangkedawang;
 7. SDN Kedungmaling;
 8. SDN Modongan;
 9. SDN Ngingasrembyong;
 10. SDN Sooko 1;
 11. SDN Sooko 2;
 12. SDN Tempuran;
 13. SDN Wringinrejo 1; dan
 14. SDN Wringinrejo 2.

N. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Gedeg meliputi :

1. SDN Balongsari;
2. SDN Bandung 1;
3. SDN Bandung 2;
4. SDN Batankrajan;
5. SDN Beratwetan 1;
6. SDN Beratwetan 2;
7. SDN Beratwetan 3;
8. SDN Gedeg;
9. SDN Gembongan;
10. SDN Gempolkerep;
11. SDN Jerukseger;
12. SDN Kemantren 1;
13. SDN Kemantren 2;
14. SDN Ngares;
15. SDN Pagerejo;
16. SDN Pagerluyung 1;
17. SDN Pagerluyung 2;
18. SDN Sidoharjo 1;
19. SDN Sidoharjo 2;
20. SDN Terusan 1;
21. SDN Terusan 2; dan
22. SDN Terusan 3.

O. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Kemlagi meliputi :

1. SDN Beratkulon;
2. SDN Betro;
3. SDN Japanan 1;
4. SDN Japanan 2;
5. SDN Kedungsari 1;
6. SDN Kedungsari 2;
7. SDN Kemlagi;
8. SDN Mojodadi;
9. SDN Mojodowo;
10. SDN Mojojebang;
11. SDN Mojojajar;
12. SDN Mojokumpul 1;
13. SDN Mojokumpul 2;
14. SDN Mojokusumo;
15. SDN Mojopilang;
16. SDN Mojorejo;
17. SDN Mojosarirejo;
18. SDN Mojowatesrejo;
19. SDN Mojowiryo;
20. SDN Mojowono;
21. SDN Pandankrajan 1;
22. SDN Pandankrajan 2;
23. SDN Tanjungan; dan
24. SDN Watesprojo.

P. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Jetis meliputi :

1. SDN Banjarsari 1;
2. SDN Banjarsari 2;
3. SDN Bendung 1;
4. SDN Bendung 2;
5. SDN Canggal;
6. SDN Jetis 1;
7. SDN Jetis 2;
8. SDN Jolotundo 1;
9. SDN Jolotundo 2;
10. SDN Kupang 1;
11. SDN Kupang 2;
12. SDN Lakardowo;
13. SDN Mlirip 1;
14. SDN Mlirip 2;
15. SDN Mlirip 3;
16. SDN Mojolebak;
17. SDN Mojorejo 1;
18. SDN Mojorejo 2;
19. SDN Mojoyoto;
20. SDN Ngabar;
21. SDN Paringan 1;
22. SDN Paringan 2;
23. SDN Penompo 1;
24. SDN Penompo 2;
25. SDN Perning;
26. SDN Sawo;
27. SDN Sidorejo 1; dan
28. SDN Sidorejo 2.

Q. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Dawarblandong meliputi :

1. SDN Bangeran 1;
2. SDN Bangeran 2;
3. SDN Banyulegi;
4. SDN Brayublandong;
5. SDN Cendoro;
6. SDN Cinandang;
7. SDN Dawarblandong;
8. SDN Gunungan;
9. SDN Gunungsari;
10. SDN Jatirowo 1;
11. SDN Jatirowo 2;
12. SDN Madureso;
13. SDN Pucuk 1;
14. SDN Pucuk 2;
15. SDN Pulorejo 1;
16. SDN Pulorejo 2;
17. SDN Randegan;
18. SDN Simongagrok 1;

19. SDN Simongagrok 2;
 20. SDN Sumberwuluh;
 21. SDN Suru;
 22. SDN Talun;
 23. SDN Temuireng 1; dan
 24. SDN Temuireng 2.
- R. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Mojoanyar meliputi :
1. SDN Gayaman;
 2. SDN Gebangmalang 1;
 3. SDN Gebangmalang 2;
 4. SDN Jabon 1;
 5. SDN Jabon 2;
 6. SDN Jumeneng;
 7. SDN Kepuhanyar;
 8. SDN Kwatu;
 9. SDN Kwedenkembar;
 10. SDN Lengkong 1;
 11. SDN Lengkong 2;
 12. SDN Ngarjo;
 13. SDN Sadartengah;
 14. SDN Sumberjati 1;
 15. SDN Sumberjati 2;
 16. SDN Wunut 1; dan
 17. SDN Wunut 2.

BUPATI MOJOKERTO,

ttd.

IKFINA FAHMAWATI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 24 TAHUN 2021
TANGGAL 4 Maret 2021

**NOMENKLATUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN)**

1. SMPN 1 Jatirejo;
2. SMPN 2 Jatirejo;
3. SMPN Satu Atap Manting Jatirejo;
4. SMPN 1 Gondang;
5. SMPN 2 Gondang;
6. SMPN 3 Gondang;
7. SMPN 1 Pacet;
8. SMPN 2 Pacet;
9. SMPN 3 Pacet;
10. SMPN 1 Trawas;
11. SMPN 2 Trawas;
12. SMPN 1 Ngoro;
13. SMPN 2 Ngoro;
14. SMPN 3 Ngoro Satu Atap;
15. SMPN 1 Pungging;
16. SMPN 2 Pungging;
17. SMPN 1 Kutorejo;
18. SMPN 2 Kutorejo;
19. SMPN 3 Kutorejo;
20. SMPN 1 Mojosari;
21. SMPN 2 Mojosari;
22. SMPN 1 Dlanggu;
23. SMPN 2 Dlanggu;
24. SMPN 1 Bangsal;
25. SMPN 2 Bangsal;
26. SMPN 1 Puri;
27. SMPN 2 Puri;
28. SMPN 1 Trowulan;
29. SMPN 2 Trowulan;
30. SMPN 1 Sooko;
31. SMPN 2 Sooko;
32. SMPN 1 Gedeg;
33. SMPN 2 Gedeg;
34. SMPN 1 Kemlagi;
35. SMPN 1 Jetis;
36. SMPN 2 Jetis;
37. SMPN 1 Dawarblandong;
38. SMPN 2 Dawarblandong;
39. SMPN 1 Mojoanyar; dan
40. SMPN 2 Mojoanyar.

BUPATI MOJOKERTO,

ttd.

IKFINA FAHMAWATI